



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH (SAKD), KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM), DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

SKRIPSI

Fitrianda

1702015069

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

JAKARTA

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH (SAKD), KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM), DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

SKRIPSI

Fitrianda

1702015069

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

JAKARTA

2021









RINGKASAN

Fitrianda (1702015069)

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta

Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah pegawai keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bangka Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 65 pegawai keuangan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian dihitung menggunakan bantuan program *software* SPSS versi 23.0. Hasil menunjukkan secara simultan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Kabupaten Bangka Selatan dengan perolehan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 72,363 > F_{tabel} 2,76$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Adapun secara parsial variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

ABSTRACT

Fitrianda (1702015069)

THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (SAKD), HUMAN RESOURCES (HR) COMPETENCE, GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) ON THE QUALITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS BANGKA SELATAN REGENCY

The Thesis of Bachelor Degree Program. Accounting Major. Economical and Business Faculty of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta.

Keyword: Regional Financial Accounting System, Human Resource Competence, Government Internal Control System, Quality of Local Government Financial Reports

This study aims to determine the effect of the application of the Regional Financial Accounting System (SAKD), Human Resource Competence (HR), Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Financial Reports of the Regional Government of South Bangka Regency in 2020. The method used in this study is the method quantitative data collection techniques using a questionnaire. The population of this study were financial employees at the Regional Apparatus Organization (OPD) of South Bangka Regency. The sample used in this study amounted to 65 financial employees. The data processing technique is done by using multiple linear regression analysis.

The results of the study were calculated using the SPSS version 23.0 software program. The results show that simultaneously the Regional Financial Accounting System (X1), Human Resource Competence (X2), Government Internal Control System (X3) have a positive and significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports (Y) South Bangka Regency with the acquisition of a significance value of $0.000 < 0.05$ and $F_{count} 72.363 > F_{table} 2.76$, which means that H_0 is rejected and H_1 is accepted. Partially, the variables of the Regional Financial Accounting System (X1), Human Resource Competence (X2), and the Government Internal Control System (X3) have a positive and significant impact on the Quality of the Regional Government Financial Reports of South Bangka Regency.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh,

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'aala atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi, dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan”**. Selama proses menyelesaikan skripsi ini penulis diberikan bantuan secara moril dan material oleh beberapa pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Bapak Dr. Zulpahmi., SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Sumardi S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin., SE., M.SI selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan., SE., MM. selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
6. Ibu Meita Larasati., S.Pd., M., Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
7. Bapak Rito, SE, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing sepenuh hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
8. Bapak Herwin Kurniawan, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan pada skripsi ini.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINIALITAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN	
AKADEMIS	v
RINGKASAN	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	13
1.2.1 Identifikasi Masalah	13
1.2.2 Pembatasan Masalah	13
1.2.3 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Gambar Penelitian Terdahulu	17
2.2 Telaah Pustaka	58
2.2.1 Akuntansi Pemerintahan	58
2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan	58
2.2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan	59
2.2.1.3 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	60
2.2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	61

2.2.2.1	<i>Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</i>	61
2.2.2.2	<i>Bagian Utama Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</i>	62
2.2.2.3	<i>Sistem Akuntansi Penerimaan Kas</i>	63
2.2.2.4	<i>Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas</i>	63
2.2.3	<i>Kompetensi Sumber Daya Manusia</i>	66
2.2.3.1	<i>Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	66
2.2.3.2	<i>Macam-Macam Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	66
2.2.3.3	<i>Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	68
2.2.3.4	<i>Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	69
2.2.4	<i>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	70
2.2.4.1	<i>Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	70
2.2.4.2	<i>Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	71
2.2.4.3	<i>Elemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	72
2.2.4.4	<i>Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	73
2.2.5	<i>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</i>	75
2.2.5.1	<i>Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</i>	75
2.2.5.2	<i>Ukuran Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</i>	75
2.2.5.3	<i>Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</i>	76
2.2.5.4	<i>Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</i>	77
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i>	79
2.3.1	<i>Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah</i>	79
2.3.2	<i>Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah</i>	80
2.3.3	<i>Hubungan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah</i>	81
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i>	83

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	85
3.1 Metode Penelitian	85
3.2 Operasional Variabel	85
3.3 Populasi dan Sampel.....	91
3.3.1 <i>Populasi Penelitian</i>	91
3.3.2 <i>Sampel Penelitian</i>	91
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	93
3.4.1 <i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	93
3.4.2 <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	93
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	94
3.5.1 <i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	94
3.5.2 <i>Uji Kualitas Data</i>	95
3.5.3 <i>Uji Asumsi Klasik</i>	97
3.5.4 <i>Analisis Regresi Linier Berganda</i>	98
3.5.5 <i>Uji Hipotesis</i>	99
3.5.5.1 <i>Uji Parsial T</i>	100
3.5.5.2 <i>Uji Simultan F</i>	101
3.5.5.3 <i>Analisis Korelasi</i>	102
3.5.5.4 <i>Analisis Koefisien Determinasi</i>	105
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	106
4.1 Gambaran Dan Penelitian	106
4.1.1 <i>Lokasi Penelitian</i>	106
4.1.2 <i>Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan</i>	106
4.1.3 <i>Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan</i>	108
4.1.4 <i>Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan</i>	108
4.2 Hasil Pengolahan Data Dan Pembahasan	110
4.2.1 <i>Hasil Pengolahan Data</i>	110
4.2.1.1 <i>Deskripsi Data</i>	110
4.2.1.2 <i>Deskripsi Data Karakteristik Responden</i>	111
4.2.2 <i>Analisis Data</i>	115
4.2.2.1 <i>Uji Statistik Deskriptif Data</i>	115

4.2.2.2 Analisis Kualitas Data	125
4.2.2.2.1 Uji Validitas	125
4.2.2.2.2 Uji Reliabilitas	129
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	130
4.2.3.1 Uji Normalitas	130
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas.....	133
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	134
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	135
4.2.5 Uji Hipotesis	136
4.2.5.1 Uji Parsial (Uji T).....	136
4.2.5.2 Uji Simultan F (Uji F)	138
4.2.5.3 Analisis Korelasi Parsial	139
4.2.5.4 Analisis Korelasi Berganda (Simultan)	141
4.2.5.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	141
4.3 Pembahasan.....	142
4.3.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	142
4.3.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	143
4.3.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	144
4.3.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	145
BAB V PENUTUP	147
5.1 Kesimpulan	147
5.2 Saran-Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019.....	3
2.	Jumlah Dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemeriksaan LKPD Tahun 2019.....	6
3.	Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan Atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2019.....	8
4.	Daftar Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2020.....	11
5.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	34
6.	Laporan Keuangan Yang Dihasilkan SKPKD dan SKPD.....	63
7.	Operasional Variabel.....	88
8.	Sampel Penelitian.....	92
9.	Skala <i>Likert</i>	94
10.	Kriteria Tingkat Pencapaian Responden.....	95
11.	Pedoman Menginterpretasi Koefisien Korelasi.....	103
12.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015.....	107
13.	Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.....	109
14.	Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	111
15.	Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	112

No	Judul	Halaman
16.	Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	113
17.	Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	113
18.	Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	114
19.	Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	115
20.	Statistik Deskriptif.....	116
21.	Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	117
22.	Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	119
23.	Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	121
24.	Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	123
25.	Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	125
26.	Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	126
27.	Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	127
28.	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	128

No	Judul	Halaman
29.	Hasil Uji Reliabilitas.....	129
30.	Hasil Uji Normalitas.....	130
31.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	133
32.	Hasil Uji Linier Berganda.....	135
33.	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	137
34.	Hasil Uji Simultan F (Uji F).....	138
35.	Hasil Uji Analisis Korelasi Parsial.....	139
36.	Hasil Uji Korelasi Simultan.....	141
37.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2).....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPIP atas LKPD Tahun 2019.....	10
2.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	82
3.	<i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	131
4.	Kurva Histogram.....	132
5.	Uji Heteroskedastisitas.....	134

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Permohonan Riset	1/70
2.	Kuesioner Penelitian.....	2/70
3.	Jawaban Kuesioner Responden.....	12/70
4.	Data Kuesioner.....	22/70
5.	Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas	31/70
6.	Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik.....	46/70
7.	Hasil Output SPSS Uji Regresi Berganda.....	49/70
8.	Nilai Tabel R, T dan F.....	51/70
9.	Surat Keterangan Penelitian.....	55/70
10.	Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.....	57/70
11.	Lembar Konsultasi Pembimbing I.....	68/70
12.	Lembar Konsultasi Pembimbing II.....	69/70
13.	Surat Tugas.....	70/70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya perubahan dalam tatanan pengelolaan keuangan negara di Indonesia mengisyaratkan, bahwa negara dalam hal ini berupaya untuk menjalankan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Dalam mempercepat perwujudan masyarakat sejahtera yang berkeadilan, pemerintah memberlakukan otonomi daerah guna mempermudah pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi pada masing-masing daerah.

Adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat melahirkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Menurut PMK No.238/PMK.05/2011 Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Adapun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh BPK-RI. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab individu maupun kelompok yang mendapat amanat untuk menjalankan tugas secara vertikal maupun horizontal (Rusiana dan Nasrudin, 2018: 21).

Opini audit atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK-RI dapat dijadikan salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun ragam opini BPK-RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) opini ini diberikan apabila laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) opini ini diterima pemerintah daerah apabila laporan keuangan yang disajikannya wajar dalam semua hal yang material kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, Tidak Wajar (TW) adapun opini ini akan diterima pemerintah daerah apabila laporan keuangan yang disajikan tidak disajikan secara

wajar sedangkan untuk laporan keuangan pemerintah yang disajikan namun tidak cukup untuk membuat opini BPK, maka opini yang akan diterima adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini audit yang diberikan oleh BPK dapat dilihat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. IHPS merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama periode 1 (satu) semester atas laporan keuangan pemerintah yang diaudit. Menurut Peraturan Bersama DPR-RI dan BPK-RI No. 1 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Kepada DPR-RI menjelaskan, bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Berikut adalah opini audit BPK atas laporan keuangan daerah propinsi se-Indonesia dalam 5 tahun terakhir 2015-2019:

Tabel 1
Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Pemeriksaan 541 LKPD
Tahun 2015-2019

LKPD (Tahun)	Opini %			
	WTP	WDP	TMP	TW
2015	58%	36%	5%	1%
2016	70%	26%	4%	0%
2017	76%	21%	3%	0%
2018	82%	16%	2%	0%
2019	90%	9%	1%	0%

Sumber: IHPS 1 BPK RI Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan BPK atas 533 LKPD Tahun 2015 mengungkapkan perolehan opini WTP sebanyak 312 (58%) LKPD, opini WDP sebanyak 187 (35%) LKPD, dan opini TMP sebanyak 30 (6%). Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD Tahun 2016 mengungkapkan perolehan opini WTP sebanyak 375 (70%) LKPD, opini WDP sebanyak 139 (26%) LKPD, dan opini TMP sebanyak 23 (4%). Untuk hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2017 mengungkapkan perolehan opini WTP sebanyak 411 (76%) LKPD, opini WDP sebanyak 113 (21%) LKPD, dan opini TMP sebanyak 18 (3%). Adapun hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 mengungkapkan perolehan opini WTP sebanyak 443 (82%) LKPD, opini WDP sebanyak 86 (16%) LKPD, dan opini TMP sebanyak 13 (2%). Sedangkan hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019 mengungkapkan perolehan opini WTP sebanyak 485 (90%) LKPD, opini WDP sebanyak 50 (9%) LKPD, dan opini TMP sebanyak 6 (1%) LKPD.

Adapun pada semester I tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 541 LKPD tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Terdapat satu pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Propinsi Papua. Hasil opini audit BPK atas LKPD pada tabel di atas mengindikasikan, bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi kualitatif laporan keuangan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah permasalahan yang ditemukan pada LKPD, adapun pada tahun 2019 sebanyak 10.499 permasalahan, diantaranya permasalahan yang

disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, salah satunya adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Adapun SAKD merupakan rangkaian prosedur yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian tahap pencatatan, melakukan pengikhtisaran, dan berakhir pada laporan keuangan. Adapun tujuan dibuatkannya laporan keuangan, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengguna anggaran atas pelaksanaan APBD yang dilakukan secara mekanis maupun non-mekanis. SAKD diperlukan dalam menjamin konsistensi laporan keuangan, karena SAKD dapat memberikan landasan mengenai prosedur, teknik, serta metode yang tepat dalam merekam kegiatan operasional pemerintahan.

Adapun menurut Mahmudi (2016: 19), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah: gabungan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah.

IHPS I tahun 2020 atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019 mengungkapkan ada 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.221 permasalahan, yakni sebesar Rp1,52 triliun serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.103 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan yang berlaku, sehingga berdampak kerugian sebanyak 2.147 permasalahan, yakni sebesar Rp898,30 miliar sedangkan untuk potensi kerugian sebanyak 359, yakni sebesar Rp342,86 miliar serta kekurangan penerimaan sebanyak 715 permasalahan, yakni sebesar Rp285,75 miliar. Berikut jumlah dan nilai permasalahan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan UU:

Tabel 2
Jumlah Dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemeriksaan LKPD Tahun 2019

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidak patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan:		
Kerugian	2.147	898,30
Potensi Kerugian	359	342,86
Kekurangan Penerimaan	715	285,75
Sub Total (1) - Berdampak Finansial	3.221	1.526,91
Penyimpangan Administrasi (2)	2.103	-
Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (1) + (2)	5.324	1.526,91
Penyetoran Uang Ke Kas Negara/Daerah Atau Penyerahan Aset		285,79

Sumber: IHPS I Tahun 2020

Dengan hasil temuan yang dilakukan oleh BPK atas permasalahan di atas, pemerintah daerah menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK, serta akan melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK salah satunya dengan melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atau dana, mengawasi dan mengendalikan

pelaksanaan tugas dengan baik, memperbaiki pengelolaan anggaran dan keuangan, serta melakukan pembinaan.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Novtania Mokoginta, Linda Lambeg, dan Winston Pontoh (2017), Surya Adhitama (2017), Arfianty dan Asnita Viriayani (2017), Abdul Hakim (2017), Muhammad Rifky Alamsyah, Sri Rahayu, dan Muhammad Muslih (2017), Rusliana Lisda, Liza Laila Nur Wulan, dan Rahmi Syifa Alifa (2018), dan Gusti Ayu Krisna Dewi (2020). Hasil dari beberapa penelitian di atas menunjukkan, bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014), Asyiyatul Latifah (2017), Gysheilla Smylle Lumintang, Linda Lambey, dan Steven J. Tangkuman (2017), Vera Riama Pangaribuan, Firmansyah, dan Muhammad Danial (2017) memiliki hasil yang berbeda, yakni Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor lain yang juga mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut dikarenakan Kompetensi SDM merupakan *central* dalam menggapai tujuan organisasi salah satunya pada organisasi pemerintah. Dengan kebutuhan publik yang semakin kompleks, pemerintah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan negara. Kompetensi SDM merupakan kemampuan dalam

menjalankan suatu pekerjaan yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan (Wibowo, 2014: 271).

IHPS I tahun 2020 atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019 mengungkapkan ada permasalahan penyimpangan administrasi sebanyak 2.103 permasalahan pada 523 pemda. Permasalahan tersebut meliputi pertanggung jawaban tidak akuntabel, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, kepemilikan aset belum didukung dengan bukti yang sah, dan penyetoran penerimaan negara atau daerah terlambat. Berikut komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan jumlah permasalahan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 :

Tabel 3
Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan Atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2019

No	Permasalahan	(%)
1	Penyimpangan Peraturan Bidang Pengelolaan Perlengkapan (BMD)	24,4%
2	Bukti Pertanggungjawaban Tidak Lengkap	22,2%
3	Penyimpangan Peraturan Bidang Tertentu	14,5%
4	Kepemilikan Aset Belum Didukung Bukti Yang Sah	13,8%
5	Penyetoran Penerimaan Negara Atau Daerah Terlambat	9,4%
6	Penyimpangan Administrasi Lainnya	15,7%
Total		100%

Sumber: IHPS I Tahun 2020

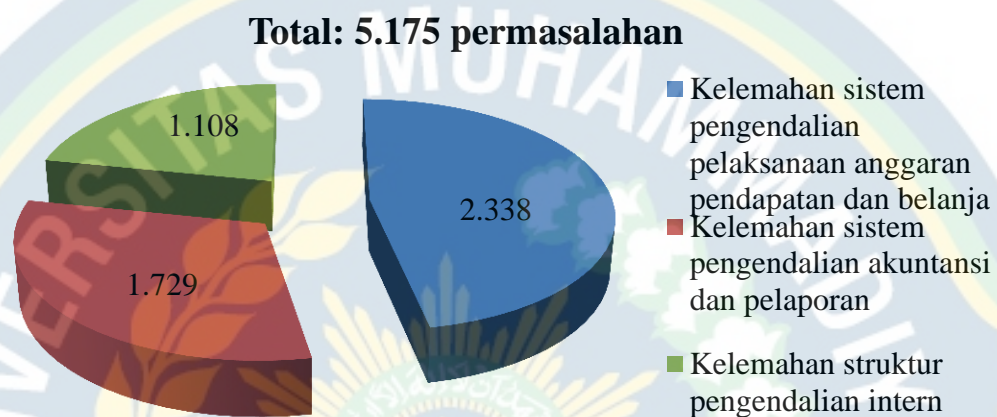
Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014), Ervinda Sri Ningsih (2014), Dewi Indriasih (2014), Ni Made Adi Erawati dan Ida

Ayu Enny Kiranayanti (2016), Winda Indriani (2016), Achdar Sanjaya (2017), Khotimatus Saadah, Riana Sitawati, dan Subchan (2017), Elvin Andrianto (2017), Lusi Putri Ikasari, Suharno, dan Bambang Widarno (2017), Lambok Vera Riama Alamsyah, Sri Rahayu, dan Muhammad Muslih (2017), Erwin Sihaya (2018), Siska Marini Milander, David Paul Ella Saerang, dan Hendrik Gamaliel (2018) dengan hasil penelitian yang menunjukkan, bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Rika Syahadatina dan Ismiatika Fitriyana (2016), Asyiyhatul Latifah (2017), Mis Widya Andelina (2017), dan Lilis Wijayanti (2017) memperoleh hasil yang berbeda, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun faktor lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Menurut Mahmudi (2017: 129) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah: suatu proses yang utuh atas kegiatan pemerintah yang *continue* yang dilakukan pimpinan maupun pegawai atas kegiatan secara efektif dan efisien, kualitatif laporan keuangan, pengamanan atas aset negara, serta ketaatan akan peraturan dan perundang-perundangan sebagai bentuk terwujudnya tujuan organisasi.

IHPS I tahun 2020 atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019 mengungkapkan atas pemeriksaan ada 541 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 mengungkapkan ada 5.175 kelemahan SPIP yang terdiri atas 1.729 dengan persentase sebesar 33% permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 dengan persentase sebesar 45% permasalahan

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.108 dengan persentase sebesar 22% permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal. Berikut komposisi permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) :



Sumber: IHPS 1 Tahun 2020

Gambar 1

Komposisi Permasalahan Kelemahan SPIP atas LKPD Tahun 2019

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Ni Made Adi Erawati dan Ida Ayu Enny Kiranayanti (2016), Rika Syahadatina, Ismiatika Fitriyana (2016), Winda Indriani (2016), Ahmad Faisol (2016), Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winson Pontoh (2017), Achdar Sanjaya (2017), Erwin Siahaya, Meinarni Asnawi, Paulus K.Allo Layuk (2018), Siska Marini Pilander, David Paul Ella Saerang, Hendrik Gamaliel (2018), Astika Rahmawati, I wayan Mustika, Lilik Handaya Eka (2018), dan Indra Firmansyah (2020). Hasil dari beberapa penelitian di atas menunjukkan, bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sedangkan hasil penelitian yang berbeda diungkapkann oleh Desiana Anugrah Budiawan dan Budi S. Purnomo (2014), Asyiyhatul Latifah (2017), Katin Wilda Maysaroh (2018), dan Nur Rahmasari Achmad (2018) yang menunjukkan, bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada uraian di atas menunjukkan, bahwa masih adanya pemerintah daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara berkualitas. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, adapun hal tersebut terlihat dari jumlah opini audit WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sejak terbentuknya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2003. Berikut Opini audit BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2015 sampai 2019 :

Tabel 4
Daftar Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Opini
1	2015	Tidak Menyatakan Pendapat (TMT)
2	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Diolah oleh peneliti 2021

Pada tabel di atas terlihat, bahwa pada LKPD tahun 2015 opini audit yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yakni TMT, adapun tahun 2016

sampai dengan tahun 2018 opini yang diterima yaitu WDP dan pada tahun 2019 opini audit yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah WTP. Tolok ukur dalam menilai KLKPD adalah dengan melihat opini audit yang diberikan oleh BPK-RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, mengingat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan baru satu kali menerima opini audit WTP terhitung sejak terbentuknya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2003.

Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan oleh As Syifa Nurillah (2014), Erwin Siahaya, Meinarni Asnawi, Paulus K.Allo Layuk (2018), dan Hendrik Gamaliel (2018) menyatakan, bahwa KLKPD dipengaruhi secara positif oleh penerapan SAKD, KSDM, dan SPIP. Adapun, penelitian yang dilakukan oleh Asyiyhatul Latifah (2017) memberikan hasil yang berbeda, yakni KLKPD tidak dipengaruhi oleh penerapan SAKD, KSDM, dan SPIP.

Adanya fenomena serta fakta-fakta yang telah jelaskan di atas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Bagaimanakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Bagaimanakah pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Bagaimanakah pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar tidak keluar dari pokok pembahasan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yakni, pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan ?
2. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan ?
3. Apakah terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan ?
4. Apakah terdapat pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Daerah (SAKD), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Akademis

- a) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai kegunaan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pentingnya Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan karir di masa yang akan datang.

- b) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya di program studi akuntansi, menjadi tambahan

referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di masa yang akan datang, serta penambah bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi serta perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di masa yang akan datang.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat sebagai bahan referensi dalam menilai kinerja pemerintah daerah, serta dapat berguna bagi masyarakat yang akan memasuki dunia pemerintahan agar dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.

c) Bagi Pemerintah Pusat

Manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemerintah daerah dan masyarakat saja, tetapi juga bagi pemerintah pusat. Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam membuat peraturan ataupun kebijakan mengenai tatanan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta dapat membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. R. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Adhitama, S. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2017). *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kineja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok)*. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 15(2).
- Andelina, M. W., & Hariyanto, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 132-153.
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2018). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2).
- Arfianty, A., & Virlyani, A. (2017). *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2).
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuanganpemerintah Daerah (studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Dewi, I. G. A. K. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali (Studi*

- Empiris Pada Skpd Provinsi Bali*) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Elsye, R., Suwanda, D., & Umuh, M. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akruwal Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Erlina, Sakti Rambe, O., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruwal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faishol, A. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)*.
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat*. Land Journal, 1(1), 1-15.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, A., Ritonga, K., & Paulus, S. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: IN MEDIA.
- Herawati, T. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. STAR–Study & Accounting Research, 11(1), 1-14.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.
- Ihsanti, E. (2014). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*. Jurnal akuntansi, 2(3).
- Ikasari, L. P. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 13(4).
- Indriani, W., & Irwansyah, I. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pemanfaatan Teknologi*

Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).

Indriasih, D., & Koeswayo, P. S. (2014). *The effect of government apparatus competence and the effectiveness of government internal control toward the quality of financial reporting in local government*. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20), 38-47.

Isdianti, W. A., & Ruslina Lisda, S. E. (2018). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Pengguna, Budaya Organisasi, Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Survey Pada Bumn Sektor Transportasi & Pergudangan)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).

Kasim, E. Y. (2015). *Effect of government accountants competency and implementation of internal control to the quality of government financial reporting*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), 97-105.

Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290-1318.

Latifah, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul)*. *Prodi Akuntansi*.

Lumintang, G. S., Lambey, L., & Tangkuman, S. (2017). *Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Manado)*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Mahadeen, B., Al-Dmour, R. H., Obeidat, B. Y., & Tarhini, A. (2016). *Examining the effect of the Organization's Internal Control System on Organizational Effectiveness: A Jordanian empirical study*. *International Journal of Business Administration*, 7(6), 22-41.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : UII Press.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press.

Marshall B, R., & Paul John, S. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marwansyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi* (Revisi ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Muda, I., Wardani, D. Y., Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). *The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening*. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 95(20).
- Muhammad, L. V. R. P. F. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(2), 106-112.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ningsih, E. S. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Tanah Datar)*. *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok)*. (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No 61. Sekreteriat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 tentang *Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*
- Perdana K, E. (2016). *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen UBB.
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 9(2).
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Riduwan, & Sunarto. (2014). *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sa'adah, K., Sitawati, R., & Subchan, S. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 64-79.
- Safkaur, O., & Sagrim, Y. (2019). *Impact of Human Resources Development on Organizational Financial Performance and Its Impact on Good Government Governance*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(5), 29.
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Layuk, P. K. A. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua*. *Kedua: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(1).

- Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Syahadatina, R., & Fitriyana, I. (2016). Vol. 1 No.1. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(1), 77-92.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. (2018). *The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports*. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1525-1531.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja*. Edisi Keempat. Jakarta: Rajawali Press.
- Wijayanti, L., Arifin, A., & CA, A. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wilda Maysaroh, K., & Wahyono, M. A. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).